

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN**

**TAHUN
ANGGARAN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota ini merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*Learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Sarilamak, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



RADIMAS, S.Pd
NIP. 49650123 198903 1 003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut akan disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



RADIMAS, S.Pd
NIP. 19650123 198903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar isi	iii
LRA	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan	2
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	2
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
2.1 Kebijakan Keuangan	4
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	4
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	9
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Ekuitas Akuntansi	11
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	13
4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA	13
4.4.2 Kebijakan Akuntansi pendapatan – LO.....	14
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja	14
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban	14
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja	16
5.2 Neraca	21
5.3 Laporan Operasional	24
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	29
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	30
BAB VII PENUTUP	31

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA				
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA	-	-		
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah				
	JUMLAH PAD	-	-		-
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.01	Belanja Pegawai	2,307,313,636.00	2,302,788,789.00	99.80	2,319,403,692.00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	961,925,389.00	953,208,156.00	99.09	985,504,004.00
2.1.05	Belanja Hibah	-			42,000,000.00
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	3,269,239,025.00	3,255,996,945.00	99.59	3,346,907,696.00
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.01	Belanja Modal Tanah				
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	507,691,000.00	501,292,510.00	98.74	1,950,000.00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-			9,380,290,289.00
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-			75,946,400.00
	Jumlah Belanja Modal	507,691,000.00	501,292,510.00	98.74	9,458,186,689.00
	JUMLAH BELANJA	3,776,930,025.00	3,757,289,455.00	99.48	12,805,094,385.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(3,776,930,025.00)	(3,757,289,455.00)	99.48	(12,805,094,385.00)

Sarilamak, Januari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


RADIMAS, S.Pd
 NIP. 19650123 198903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No. Akun	Uraian	2022	2021
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan		
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.1.01.04.	Kas di BLUD		
1.1.01.05.	Kas Dana BOS		
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07.	Kas Lainnya		
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi		
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.05.03.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.06.06.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.06.07.	Piutang Pendapatan Bunga		
1.1.06.16.	Piutang Pendapatan BLUD		
1.1.06.18.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
1.1.06.19.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
1.1.07.01.	Piutang Dana Perimbangan		
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah		
1.1.08.01.	Piutang Bagi Hasil		
1.1.09.	Piutang Lainnya		
1.1.10.	Penyisihan Piutang		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.10.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.10.01.03.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Kekyn Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.10.01.04.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.12.	Persediaan	256.600,00	
	Jumlah Aset Lancar	256.600,00	-
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05.	Dana Bergulir		
1.2.01.05.01.	Dana Bergulir Kepada Koperasi		
1.2.01.05.02.	Dana Bergulir Kepada Masyarakat		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal		
	Jumlah Investasi Jk Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3.	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	1.644.441.684,00	1.644.441.684,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	2.702.974.315,00	2.301.581.805,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	9.602.448.443,00	9.602.448.443,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	199.172.246,00	199.172.246,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	683.371.370,00	683.371.370,00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.730.007.005,20	2.360.902.999,60
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.245.284.307,00	2.087.172.655,00
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	444.888.249,00	253.813.120,00
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.834.449,20	19.917.224,60
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Aset Tetap	12.102.401.052,80	12.070.112.548,40
1.5.	ASET LAINNYA	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.03.01.01.0005.	Software	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.04.	Aset Lain-lain	-	-
1.5.04.01.	Aset lain-lain	-	-
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	-	-
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	118.500.000,00	118.500.000,00
	JUMLAH ASET	12.221.157.652,80	12.188.612.548,40
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.01.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga		
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka		
2.1.06.	Utang Belanja		
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa		
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa		
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		

U/2/2023.

No. Akun	Uraian	2022	2021
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	12.221.157.652,80	12.188.612.548,40
	JUMLAH EKUITAS	12.221.157.652,80	12.188.612.548,40
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.221.157.652,80	12.188.612.548,40

Santiamak, Januari 2023
 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Kabupaten Lima Puluh Kota



Herlitas S.Pd
 NIP.196501230969031003

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kode Akun	Uraian	2022	2021	Bertambah/ Berkurang	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7.	PENDAPATAN				
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-		
7.1.01.	Pajak Daerah-LO	-	-		
7.1.02.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	-	-		
7.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-		
	JUMLAH PAD	-	-		
7.2.	PENDAPATAN TRANSFER				
7.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	-	-		
7.2.01.01.	Dana Perimbangan-LO	-	-		
7.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	-		
7.2.01.05.	Dana Desa-LO	-	-		
7.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	-	0		
7.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	-	0		
7.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	-	0		
7.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	-	-		
7.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	-	-		
	JUMLAH TRANSFER	-	0		
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	-	0		
7.3.01.	Pendapatan Hibah-LO	-	-		
7.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang	-	-		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	-	0.00		
8.	BEBAN	3,724,744,350.60	3,708,964,405.39		
8.1.	BEBAN OPERASI	3,255,740,345.00	3,346,907,696.00		
8.1.01.	Beban Pegawai	2,302,788,789.00	2,319,403,692.00		
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	952,951,556.00	985,504,004.00		
	Beban Persediaan	71,963,500.00	133,943,300.00		
	Beban Jasa	729,637,017.00	512,595,414.00		
	Beban Pemeliharaan	29,560,750.00	82,252,985.00		
	Beban Perjalanan Dinas	121,790,289.00	256,712,305.00		
8.1.05.	Beban Hibah	-	42,000,000.00		
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial	-	-		
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	-	-		
8.2.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	369,104,005.60	362,056,709.39		
8.3.	BEBAN TRANSFER	-	-		
8.4.	BEBAN TAK TERDUGA	-	-		
	Beban Lain-Lain	99,900,000.00			
	JUMLAH BEBAN	3,724,744,350.60	3,708,964,405.39		
	SURPLUS/ (DEFISIT)-LO	3,724,744,350.60	-3,708,964,405.39		

Sarilamak, Januari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

NOMOR	Uraian	2022	2021
1	Ekuitas Awal	12,188,612,548.40	3,092,482,568.79
2	Surplus/defisit - LO	- 3,724,744,350.60	(3,708,964,405.39)
3	R/K PPKD	3,757,289,455.00	12,805,094,385.00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	-	-
	Koreksi Akm. Penyutan Pertama kali		
	Koreksi Hutang Tahun Lalu	-	-
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	-	-
	Mutasi Tambah Aset Tetap	-	-
	Mutasi Kurang Aset Tetap	-	-
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya	-	-
	Koreksi kurang aset Ekstra Kompatabel		
5	Ekuitas Akhir	12,221,157,652.80	12,188,612,548.40

Sarilamak,

Januari 2023

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



RADIMAS, S.Pd
NIP. 19650123 198903 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tugas Pokok

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Pembinaan Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksana tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2022, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepekat antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan berdampak pada sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA/DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro;
 - 2.2 Kebijakan Keuangan;
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
 - 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA
 - 4.4.2 Kebijakan Akuntansi – LO
 - 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja
 - 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

- V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Neraca
 - 5.3 Laporan Operasional
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

- VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengelola DPA/DPPA Tahun Anggaran 2022 meliputi hal berikut :

2.2.1 Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA/DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA/DPPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA/DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun Penetapan Kinerja yang termuat dalam 5 (lima) program utama, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dijabarkan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.320.673.636	2.313.206.193	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.320.673.636	2.313.206.193	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.905.389	121.905.389	100
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	289.000	289.000	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.139.900	19.139.900	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.261.200	9.261.200	100
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.875.000	6.875.000	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.340.289	86.340.289	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	515.231.000	507.367.510	98
1	Pengadaan Mebel	405.460.000	397.996.510	98
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.771.000	109.371.000	99

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.540.000	715.369.613	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.900.000	74.159.613	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	640.940.000	640.510.000	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.580.000	29.560.750	100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.160.000	28.140.750	100

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.420.000	1.420.000	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-

2. Program Pembinaan Perpustakaan

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya Program Pembinaan Perpustakaan.

Program ini dijabarkan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	15.380.000	15.365.000	100
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.380.000	3.365.000	100
2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	10.000.000	10.000.000	100
3	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	2.000.000	2.000.000	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.110.000	20.060.000	100
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	15.000.000	15.000.000	100
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	5.110.000	5.060.000	100

3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno ,program ini di jabarkan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	3.000.000	100
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	3.000.000	3.000.000	100

4. Program Pengelolaan Arsip

Sasaran dari program ini adalah peningkatan ketersediaan data dan kajian peningkatan pengelolaan arsip. Program ini di jabarkan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	12.730.000	12.730.000	100
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	11.930.000	11.930.000	100
2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	800.000	800.000	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1.770.000	1.770.000	100
1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	1.770.000	1.770.000	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	9.390.000	9.335.000	100
1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	2.880.000	2.880.000	100
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	6.510.000	6.455.000	100

5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya Pogram Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Program ini di jabarkan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	1.600.000	1.600.000	100
1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	800.000	800.000	100
2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	800.000	800.000	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	4.820.000	4.820.000	100
1	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	4.820.000	4.820.000	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan , dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	400.000	400.000	100
1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000	400.000	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	800.000	800.000	100
1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	400.000	400.000	100
2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	400.000	400.000	100

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Belanja

Total realisasi belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.757.289.455,- Jumlah tersebut mencapai 99,48% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 3.776.930.025,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA DAERAH	3.776.930.025	3.757.289.455	99,48
Belanja Operasi	3.269.239.025	3.255.996.945	99,59
Belanja Pegawai	2.307.313.636	2.302.788.789	99,80
Belanja Barang dan Jasa	961.925.389	953.208.156	99,09
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-
Belanja Modal	507.691.000	501.292.510	98,74
Belanja Peralatan dan Mesin	507.691.000	501.292.510	98,74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	Rp. 3.776.930.025,-	Rp. 3.757.289.455,-	99,48

Pada Belanja Pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.307.313.636,- terealisasi sebesar Rp. 2.302.788.789,- atau sebesar 99,80%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 4.524.847,- disebabkan karena terjadinya mutasi dan rotasi ASN sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan realisasi dengan anggaran yang ditetapkan.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 961.925.389,- terealisasi sebesar Rp. 953.208.156,- atau sebesar 99,09%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.717.233,-

Pada belanja modal belanja peralatan dan mesin anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 507.691.000,- terealisasi sebesar Rp. 501.292.510,- atau sebesar 98,74 %. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.398.490,-

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.

4.1 Ekuitas Akuntansi

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah *basis akuntansi akrual*.

- 1) Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, Belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Pendapatan –LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan –LRA diakui pada saat kas terima di kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui kas daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- 2) Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan diharapkan diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas setara kas diterima atau dibayar.

- 3) Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten adalah sebagai berikut :

1) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, konversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/ nilai rupiah piutang belum dilunasi.

3) Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4) Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada peroleh persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

5) Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya untuk memperolehnya kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*)

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikansi

atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable Value*).

6) Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

7) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan.

8) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat asset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap pakai.

9) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontaro meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LRA

Pendapatan –LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan –LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat

1. Diterima di rekening kas umum daerah atau
2. Diterima oleh SKPD atau
3. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD

Pendapatan –LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LO

Pendapatan –LO adalah hak atas pendapatan daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan –LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned atau
2. Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran kas masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan –LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

Belanja diakui pada saat terjadi dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD

Belanja diukur dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan akuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui saat :

Timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

Terjadinya konsumsi asset

Terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlakunya waktu.

Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar bebas yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi asset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
2	Belanja	3.757.289.455	12.805.094.385
2.1	Belanja Operasi	3.255.996.945	3.346.907.696
2.1.01	Belanja Pegawai	2.302.788.789	2.319.403.692
Jumlah tersebut merupakan belanja pegawai dalam tahun anggaran 2022 dan tahun 2021. jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :			
2.1.01.01	Belanja Gaji dan tunjangan	1.645.413.121	1.598.216.484,-
	- Belanja Gaji Pokok ASN	1.292.861.120	1.233.757.160
	- Belanja Tunjangan Keluarga ASN	82.238.025	104.940.573
	- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	160.955.000	147.990.000
	- Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.200.000	11.200.000
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.015.000	22.710.000
	- Belanja Tunjangan Beras ASN	57.501.480	64.453.800
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.026.864	2.972.953
	- Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.640	8.377
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.649.996	2.545.887
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.949.996	7.637.734
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	632.475.668	547.197.208
	- Tambahan penghasilan ASN	632.475.668	547.197.208,-
2.1.01.03.	Tambahan penghasilan Objektif Lainnya	24.900.000	173.990.000,-
	- Belanja Honorarium	24.900.000	173.990.000,-
	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.800.000	173.190.000,-
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.100.000	800.000

2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	953.208.156	985.504.004,-
<p>Jumlah tersebut merupakan belanja barang dan jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam tahun anggaran 2022 sebesar Rp.953.208.156,- dan tahun 2021 sebesar Rp 985.504.004,- dimana jumlah realisasi belanja barang dan jasa mencapai 99,09% dari anggaran yang ditetapkan. Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut:</p>			
	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
2.1.02.01.01.	Belanja bahan pakai habis	72.220.100	133.943.300
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.330.000	30.700.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.509.700	41.915.500
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	800.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.261.200	26.654.900
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000	1.250.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	289.000	1.293.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	189.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.630.200	3.116.900
	- Belanja Obat-Obatan-Obat	-	684.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.625.000	11.090.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.875.000	16.250.000
2.1.02.02.	Belanja jasa	729.637.017	506.745.414,-
	- Belanja Jasa Kantor	714.119.613	377.578.965
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	80.000
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.390.000	15.790.000
	- Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	90.000.000	88.500.000

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	6.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	159.000.000	116.450.000
	- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	54.000.000	54.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	143.785.000	18.000.000
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	143.785.000	-
	- Belanja Jasa Tenaga Supir	36.000.000	36.000.000
	- Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	-	2.750.000
	- Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	-	9.000.000
	- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	-	5.175.000
	- Belanja Tagihan Telepon	423.900	989.000
	- Belanja Tagihan Air	1.950.000	429.970
	- Belanja Tagihan Listrik	68.269.013	6.698.595
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	3.647.000
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.516.700	6.831.400
	- Belanja Paket/Pengiriman	-	132.000
	- Belanja Lembur	-	7.106.000
	- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.517.404	13.136.149
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.266.204	10.532.332
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	905.098	650.957
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.346.102	1.952.860
	- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	116.030.300

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	3.960.000
	- Belanja Sosialisasi	-	39.645.300
	- Belanja Bimbingan Teknis	-	72.425.000
2.1.02.03.	Belanja pemeliharaan	29.560.750	82.252.985,-
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.560.750	77.540.985
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.440.750	52.164.485
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.700.000	20.725.900
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pendingin	-	1.830.000
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	730.000	1.458.600
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	690.000	1.362.000
	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	4.712.000
2.1.02.04.	Belanja perjalanan dinas	121.790.289	256.712.305,-
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.305.289	182.667.305
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.485.000	74.045.000
2.1.02.05.	Belanja uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	5.850.000,-
	- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	5.850.000,-
2.1.05.	Belanja Hibah	-	42.000.000,-
	- Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	42.000.000,-
Pada tahun anggaran 2022 tidak ada Hibah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .			

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
2.2	Belanja Modal	501.292.510	9.458.186.689,-
Belanja tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal dalam tahun 2022 sebesar Rp 501.292.510 ,- (98,74%) dan Tahun 2021 Rp 9.458.186.689,- (93,85%).Jumlah realisasi dan anggaran belanja modal tersebut terinci atas :			
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	501.292.510	1.950.000,-
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	461.292.510	-
	- Belanja Modal Alat Kantor	7.191.000	
2.2.02.05	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	454.101.510	
	- Belanja Modal Mebel	388.101.510	
	- Belanja Modal Alat Pendingin	50.000.000	
	- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.000.000	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	1.950.000,-
2.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio	30.000.000,	-
2.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	10.000.000	-
2.2.03.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	9.380.290.289,-
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	-	9.380.290.289,-
2.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	75.946.400,-
	- Belanja Modal bahan perpustakaan	-	69.446.400,-
	- Belanja Modal barang bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	-	6.500.000,-

5.2 Neraca

1. Aset	Tahun 2022(Rp)	Tahun 2021(Rp)
1.1. Aset Lancar	256.600,-	-
a. Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
b. Kas di bendahara Pengeluaran	-	-
1.3. Aset Tetap		
1.3.01 Tanah	1.644.441.684,-	1.644.441.684,-
Tidak terdapat penambahan nilai aset tanah dari tahun 2021 ke tahun 2022, yang mana aset tanah tersebut merupakan mutasi tambah dari Setda dan reklas dari gedung dan bangunan (KIB C).		
1.3.02 Peralatan dan Mesin	2.702.974.315,-	2.301.581.805,-
Jumlah tersebut merupakan nilai aset peralatan dan mesin tahun 2022 dan 2021. Terdapat mutasi nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp 401.392.510,- dengan rincian mutasi sebagai berikut :		
Mutasi tambah		
- Alat kantor dan rumah tangga	461.292.510,-	
- Alat studio dan komunikasi	30.000.000,-	
- Alat peraga	10.000.000,-	
Jumlah	501.292.510,-	
- Aset ekstra kompatible	99.900.000	
Jumlah Total :	501.292.510 – 99.900.000 = 401.392.510	
1.3.03 Gedung dan Bangunan	9.602.448.443,-	9.602.448.443,-
Tidak terdapat penambahan nilai asset Gedung dan Bangunan dari tahun 2021 ke tahun 2022.		
1.3.04 Jalan,Irigasi dan Jaringan	199.172.246,-	199.172.246,-
Tidak terdapat penambahan nilai asset Jalan,Irigasi dan Jaringan dari tahun 2021 ke tahun 2022.		
1.3.05 Aset Tetap Lainnya	683.371.370,-	683.371.370,-
Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya tahun 2022 dan 2021. Tidak terdapat penambahan nilai aset tetap lainnya pada tahun 2022.		

	Tahun 2022(Rp)	Tahun 2021(Rp)
1.3.07 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.730.007.005,20,-	2.360.902.999,60,-
1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.245.284.307,-	2.087.172.655,-
Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	904.885.555,-	902.694.555,-
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.695.552,-	421.077.250,-
Akumulasi Penyusutan Komputer	669.636.000,-	632.942.250,-
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Studio	169.467.200,-	130.058.600,-
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	600.000,-	400.000,-
Jumlah	2.245.284.307,-	2.087.172.655,-
1.3.07.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	444.888.249,-	253.813.120,-
Akumulasi Penyusutan Rehab Gedung	76.840.791,42	67.457.850,82,-
Akumulasi Penyusutan Garasi Mobil	5.699.320,-	5.181.200,-
Akumulasi Penyusutan Gedung Perpustakaan Umum Daerah	362.348.137,72,-	181.174.068,86,-
Jumlah	444.888.249,-	253.813.120,-
1.3.7.02 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.834.449,20,-	19.917.224,60,-
Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan rincian terlampir (Tabel perhitungan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan (KIB C).		

	Tahun 2022(Rp)	Tahun 2021(Rp)
Jumlah Aset Tetap	12.102.401.052,80,-	12.070.112.548,40,-
1.5. Aset Lainnya	118.500.000,-	118.500.000,-
Jumlah tersebut merupakan aset lainnya tahun 2022 dan 2021. Tidak terdapat penambahan nilai aset lainnya di tahun 2022.		
Kewajiban	-	-
Ekuitas	12.221.157.652,80,-	12.188.612.548,40,-
Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada posisi per 31 Desember 2022 sebesar 12.221.157.652,80,- dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 12.188.612.548,40,-		

1.2 Laporan Operasional

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
7. Pendapatan Daerah		-	-
Pendapatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan nihil.			
8.1. Beban Operasional		3.724.744.350,60	3.708.964.405,39
Laporan tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2022.			
Jumlah realisasi dan anggaran beban Pegawai pada Tahun 2022 sebesar Rp 2.302.788.789,- (99,80 %) dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.319.403.692,- (99,25 %) sebagai berikut:			
8.1.01.	BEBAN PEGAWAI –LO	2.302.788.789	2.319.403.692,-
8.1.01.01.	BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN –LO	1.645.413.121	1.598.216.484,-
8.1.01.01.01.	Gaji pokok PNS/Uang Resrepresentasi –LO	1.292.861.120	1.233.757.160,-
8.1.01.01.02.	Tunjangan Keluarga –LO	82.238.025	104.940.573,-
8.1.01.01.03.	Tunjangan Jabatan –LO	160.955.000	147.990.000,-
8.1.01.01.04.	Tunjangan Fungsional –LO	11.200.000	11.200.000,-
8.1.01.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum –LO	26.015.000	22.710.000,-
8.1.01.01.06.	Tunjangan Beras –LO	57.501.480	64.453.800,-
8.1.01.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus –LO	4.026.864	2.972.953,-
8.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.640	8.377,-
8.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.649.996	2.545.887,-
8.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.949.996	7.637.734,00
Jumlah realisasi dan anggaran beban Tambahan Penghasilan PNS pada Tahun 2022 sebesar Rp 632.475.668,- dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 547.197.208,- sebagai berikut:			
8.1.01.02.	BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS –LO	632.475.668	547.197.208,-
8.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja –LO	632.475.668	547.197.208,-
Jumlah realisasi dan anggaran beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn pada Tahun 2022 sebesar Rp 24.900.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2021 Rp 173.990.000,- sebagai berikut:			
8.1.01.03.	BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN	24.900.000	173.990.000,-
8.1.01.03.07.	Beban Honorarium	24.900.000	173.990.000,-
Jumlah realisasi dan anggaran Beban Persediaan pada Tahun 2022 sebesar Rp 71.963.500,- dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 133.943.300,- sebagai berikut:			

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
8.1.02.01.	BEBAN PERSEDIAAN	71.963.500	133.943.300,-
8.1.02.01.01.	BEBAN BAHAN PAKAI HABIS	71.963.500	133.943.300,-
8.1.02.01.01.004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO	26.330.000	30.700.000,-
8.1.02.01.01.012.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	-	800.000,-
8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-LO	14.253.100	41.915.500,-
8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-LO	9.261.200	26.654.900,-
8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos-LO	700.000	1.250.000,-
8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO	289.000	1.293.000,-
8.1.02.01.01.0032.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas-LO	-	189.000,-
8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.630.200	3.116.900,-
8.1.02.01.01.0037.	Beban Obat-Obatan-Obat	-	684.000,-
8.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	9.625.000	11.090.000,-
8.1.02.01.01.0053.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.875.000	16.250.000,-
Jumlah realisasi dan anggaran beban Jasa pada Tahun 2022 sebesar Rp 729.637.017,- dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 512.595.414,- sebagai berikut:			
8.1.02.02.	BEBAN JASA	729.637.017	512.595.414,-
8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	80.000,-

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
8.1.02.02.01.004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.390.000	15.790.000,-
8.1.02.02.01.0024.	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	90.000.000	88.500.000,-
8.1.02.02.01.0025.	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	6.000.000,-
8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	159.000.000	116.450.000,-
8.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	54.000.000	54.000.000,-
8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	143.785.000	18.000.000,-
8.1.02.02.01.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	143.785.000	
8.1.02.02.01.0033.	Beban Jasa Tenaga Supir	36.000.000	36.000.000,-
8.1.02.02.01.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	-	2.750.000,-
8.1.02.02.01.0052.	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	-	9.000.000,-
8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	-	5.175.000,-
8.1.02.02.01.0059.	Beban Tagihan Telepon	423.900	989.000,-
8.1.02.02.01.0060.	Beban Tagihan Air	1.950.000	429.970,-
8.1.02.02.01.0061.	Beban Tagihan Listrik	68.269.013	6.698.595,-
8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	3.647.000,-
8.1.02.02.01.0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.516.700	6.831.400,-
8.1.02.02.01.0064.	Beban Paket/Pengiriman	-	132.000,-
8.1.02.02.01.0071.	Beban Lembur	-	7.106.000,-
<p>Jumlah realisasi dan anggaran beban Iuran Jaminan/Asuransi pada Tahun 2022 sebesar Rp 15.517.404,- dan untuk Tahun Anggaran 2021 Rp 13.136.149,- sebagai berikut:</p>			
8.1.02.02.02.	BEBAN IURAN JAMINAN/ASURANSI	15.517.404	13.136.149,-

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
8.1.02.02.02.005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.266.204	10.532.332,-
8.1.02.02.02.006.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	905.098	650.957,-
8.1.02.02.02.007.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.346.102	1.952.860,-
Jumlah realisasi dan anggaran beban Iuran Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan pada Tahun 2022 sebesar 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2021 Rp 116.030.300,- sebagai berikut:			
8.1.02.02.12.	BEBAN KURSUS/PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	116.030.300,-
8.1.02.02.12.001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	-	3.960.000,-
8.1.02.02.12.002.	Beban Sosialisasi	-	39.645.300,-
8.1.02.02.12.003.	Beban Bimbingan Teknis	-	72.425.000,-
Jumlah realisasi dan anggaran beban Pemeliharaan pada Tahun 2022 sebesar Rp 29.560.750,- dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 82.252.985,- sebagai berikut:			
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
8.1.02.03.	BEBAN PEMELIHARAAN	29.560.750	82.252.985,-
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.560.750	77.540.985,-
8.1.02.03.02.0036.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.440.750	52.164.485,-
8.1.02.03.02.0038.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.700.000	20.725.900,-
8.1.02.03.02.0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	1.830.000,-
8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	730.000	1.458.600,-
8.1.02.03.02.0411.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	690.000	1.362.000,-
Jumlah realisasi dan anggaran beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan pada Tahun 2022 sebesar Rp 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 4.712.000,- sebagai berikut:			

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
8.1.02.03.03.	BEBAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	-	4.712.000,-
8.1.02.03.03.001.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	-	4.712.000,-
Jumlah realisasi dan anggaran beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2022 sebesar Rp 121.790.289,- dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 256.712.305,- sebagai berikut:			
8.1.02.04.	BEBAN PERJALANAN DINAS	121.790.289	256.712.305,-
8.1.02.04.01.001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	82.305.289	182.667.305,-
8.1.02.04.01.003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.485.000	74.045.000,-
8.1.05.	BEBAN HIBAH	-	42.000.000,-
8.1.05.05.02.002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	42.000.000,-
Jumlah realisasi dan anggaran Beban Penyusutan Dan Amortisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp 369.104.005,60,- dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 362.056.709,39,- sebagai berikut:			
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	369.104.005,60,-	362.056.709,39,-
8.4.01.	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	158.111.652,-	146.401.275,-
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	191.075.129,-	195.738.209,79,-
	Beban Penyusutan JIJ	19.917.224,60,-	19.917.224,60,-
Jumlah realisasi dan anggaran Beban lain-lain pada Tahun 2022 sebesar Rp 99.900.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,- sebagai berikut:			
	BEBAN LAIN-LAIN	99.900.000,-	-
	Aset Ekstrakom	99.900.000,-	-

1.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

	Tahun 2022	Tahun 2021
Ekuitas Awal	12.188.612.548,40,-	3.092.482.568,79,-
Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.092.482.568,79,- dan ekuitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 sebesar Rp. 12.188.612.548,40,- yang terdiri dari:		
Aset lancar		-
Aset tetap 2022		
Aset lainnya 2022		
Jumlah		-
Surplus / defisit –LO	(3.724.744.350,60)	(3.708.964.405,39)
Surplus Defisit –LO merupakan selisih antara Pendapatan –LO dengan Beban –LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (3.708.964.405,39) dan pada tahun 2022 surplus defisit –LO sebesar Rp. (3.724.744.350,60)		
R/K PPKD	3.757.289.455,-	12.805.094.385,-
R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurang dan utang perhitungan pihak ketiga, dimana R/K PPKD per 31 Desember 2021 Rp. 12.805.094.385,- dan pada tahun 2022 R/K PPKD Rp. 3.757.289.455,-		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	-	-
Jumlah mutasi tambah aset tetap tetap sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0		
Mutasi tambah aset tetap	-	-
Mutasi kurang aset tetap	-	-
Mutasi tambah aset lainnya	-	-
Koreksi akumulasi AT-PM tahun sebelumnya	-	-
Ekuitas Akhir	12.221.157.652,80,-	12.188.612.548,40
Ekuitas Akhir merupakan nilai kekayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.221.157.652,80,-		

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah unsur penunjang Pemerintah daerah di bidang sumber daya manusia, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati selaku kepala daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Struktur Organisasi

Didasarkan kepada peraturan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perpustakaan dan Kearsipan. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Laporan
- e. Kepala Bidang Perpustakaan
- f. Kepala Bidang Kearsipan
- g. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan
- h. Seksi Pengembangan Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK
- i. Seksi Deposit Dan Pelestarian Bahan Pustaka
- j. Seksi Promosi dan Pelayanan Perpustakaan
- k. Bidang Kearsipan
- l. Seksi Arsip Dinamis
- m. Seksi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
- n. Seksi Arsip Statis Dan Layanan Informasi Kearsipan
- o. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan
- p. Kasi Pembinaan Perpustakaan
- q. Kasi Pembinaan Kearsipan
- r. Kasi Pengawas Perpustakaan dan Kearsipan

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

- Total realisasi belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.757.289.455,- Jumlah tersebut mencapai 99,48 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 3.776.930.025,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA DAERAH	3.776.930.025	3.757.289.455	99,48
Belanja Operasi	3.269.239.025	3.255.996.945	99,59
Belanja Pegawai	2.307.313.636	2.302.788.789	99,80
Belanja Barang dan Jasa	961.925.389	953.208.156	99,09
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-
Belanja Modal	507.691.000	501.292.510	98,74
Belanja Peralatan dan Mesin	507.691.000	501.292.510	98,74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	Rp. 3.776.930.025,-	Rp. 3.757.289.455,-	99,48

Dari rincian di atas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan dengan serapan dana 99,48%. Tidak terjadi perbedaan yang signifikan dalam anggaran belanja dengan realisasi belanja.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : 2.23.2.24.0.00.17. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 dan 2021

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
2.	<u>BELANJA DAERAH</u>	3.776.930.025,00	3.757.289.455,00	99,48	
2.1.	BELANJA OPERASI	3.269.239.025,00	3.255.996.945,00	99,59	
2.1.01.	Belanja Pegawai	2.307.313.636,00	2.302.788.789,00	99,80	
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	961.925.389,00	953.208.156,00	99,09	
2.1.05.	Belanja Hibah	-	-	-	
2.2.	BELANJA MODAL	507.691.000,00	501.292.510,00	98,74	
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	507.691.000,00	501.292.510,00	98,74	
2.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.776.930.025,00)	(3.757.289.455,00)	99,48	

SARILAMAK, 31 Desember 2022
KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIN HARI ENDI, S.E. M.M
NIP. 19690417 199303 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : 2.23.2.24.0.00.17. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 dan 2021

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
2.	<u>BELANJA DAERAH</u>	3.776.930.025,00	3.757.289.455,00	99,48	
2.1.	BELANJA OPERASI	3.269.239.025,00	3.255.996.945,00	99,59	
2.1.01.	Belanja Pegawai	2.307.313.636,00	2.302.788.789,00	99,80	
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.648.283.672,00	1.645.413.121,00	99,83	
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.295.815.320,00	1.292.861.120,00	99,77	
2.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	1.295.815.320,00	1.292.861.120,00	99,77	
2.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	82.279.041,00	82.238.025,00	99,95	
2.1.01.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	82.279.041,00	82.238.025,00	99,95	
2.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	160.955.000,00	160.955.000,00	100,00	
2.1.01.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	160.955.000,00	160.955.000,00	100,00	
2.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	
2.1.01.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	
2.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.015.000,00	26.015.000,00	100,00	
2.1.01.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.015.000,00	26.015.000,00	100,00	
2.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	57.226.960,00	57.501.480,00	100,48	
2.1.01.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	57.226.960,00	57.501.480,00	100,48	
2.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.147.889,00	4.026.864,00	97,08	
2.1.01.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.147.889,00	4.026.864,00	97,08	
2.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.112,00	15.640,00	97,07	
2.1.01.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.112,00	15.640,00	97,07	
2.1.01.01.01.10.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.657.085,00	2.649.996,00	99,73	
2.1.01.01.01.10.00	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.657.085,00	2.649.996,00	99,73	
2.1.01.01.01.11.	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	7.971.265,00	7.949.996,00	99,73	
2.1.01.01.01.11.00	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	7.971.265,00	7.949.996,00	99,73	
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	632.679.964,00	632.475.668,00	99,97	
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	632.679.964,00	632.475.668,00	99,97	
2.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	632.679.964,00	632.475.668,00	99,97	
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	26.350.000,00	24.900.000,00	94,50	
2.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	
2.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	26.350.000,00	24.900.000,00	94,50	
2.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	
2.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.550.000,00	5.100.000,00	77,86	
2.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	
2.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	-	-	-	
2.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	
2.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	-	-	-	
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	961.925.389,00	953.208.156,00	99,09	
2.1.02.01.	Belanja Barang	72.260.100,00	72.220.100,00	99,94	
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	72.260.100,00	72.220.100,00	99,94	
2.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.370.000,00	26.330.000,00	99,85	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.509.700,00	14.509.700,00	100,00	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.261.200,00	9.261.200,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000,00	700.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	289.000,00	289.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.630.200,00	4.630.200,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.625.000,00	9.625.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00	
2.1.02.02.	Belanja Jasa	738.200.000,00	729.637.017,00	98,84	
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	718.290.000,00	714.119.613,00	99,42	
2.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.390.000,00	13.390.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	159.000.000,00	159.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	144.000.000,00	143.785.000,00	99,85	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	144.000.000,00	143.785.000,00	99,85	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Supir	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	1.050.000,00	423.900,00	40,37	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	68.800.000,00	68.269.013,00	99,23	
2.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.100.000,00	3.516.700,00	57,65	
2.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	19.910.000,00	15.517.404,00	77,94	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.545.000,00	13.266.204,00	75,61	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	990.000,00	905.098,00	91,42	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.375.000,00	1.346.102,00	97,90	
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	29.580.000,00	29.560.750,00	99,93	
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.580.000,00	29.560.750,00	99,93	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.460.000,00	20.440.750,00	99,91	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	730.000,00	730.000,00	100,00	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	690.000,00	690.000,00	100,00	
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	121.885.289,00	121.790.289,00	99,92	
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	121.885.289,00	121.790.289,00	99,92	
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.305.289,00	82.305.289,00	100,00	
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.580.000,00	39.485.000,00	99,76	
2.1.05.	Belanja Hibah	-	-	-	
2.1.05.03.	Belanja Hibah kepada BUMN	-	-	-	
2.1.05.03.01.	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	-	-	-	
2.1.05.03.02.	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	-	-	-	
2.2.	BELANJA MODAL	507.691.000,00	501.292.510,00	98,74	
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	507.691.000,00	501.292.510,00	98,74	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
2.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	
2.2.02.01.02.	Belanja Modal Alat Besar Apung	-	-	-	
2.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	
2.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	
2.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-	
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	467.691.000,00	461.292.510,00	98,63	
2.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	7.191.000,00	7.191.000,00	100,00	
2.2.02.05.01.00	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.191.000,00	7.191.000,00	100,00	
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	460.500.000,00	454.101.510,00	98,61	
2.2.02.05.02.00	Belanja Modal Mebel	394.500.000,00	388.101.510,00	98,38	
2.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pendingin	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
2.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
2.2.02.06.01.00	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
2.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-	-	
2.2.02.16.	Belanja Modal Alat Peraga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.2.02.16.01.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.2.02.16.01.00	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	
2.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	-	-	-	
2.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-	
2.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	-	-	-	
2.2.04.03.04.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-	-	
2.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.776.930.025,00)	(3.757.289.455,00)	99,48	

SARILAMAK, 31 Desember 2022
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIN HARI ENDI, S.E, M.M
 NIP. 19690417 199303 1 006

Mutasi Tambah AT (Diluar BM 2022)

	2021	Tambah	Kurang	2022
1 TANAH	1,644,441,684			1,644,441,684
	BM 2022			1,644,441,684
2 PM	2,301,581,805			2,702,974,315
	BM 2022	501,292,510.00		2,702,974,315
	Reklass masuk dari GB			
	Aset ekstra komptable		99,900,000	Kursi Rapat
3 G & B	9,602,448,443.00			9,602,448,443
	BM 2022	-		9,602,448,443
	Reklass masuk dari KDP			
	Reklass keluar ke PM			
	Reklass ke JIJ			
4 JIJ	199,172,246			199,172,246
	BM 2022			199,172,246
	Reklass masuk			
5 AT Lainnya	683,371,370			683,371,370
	BM 2022			683,371,370
6 KDP	-			-
	Reklas Keluar			-
7 Aset Lainnya	118,500,000			118,500,000
	BM 2022			118,500,000

501,292,510

99,900,000

B. Modal 2022

501,292,510

PEND. DARI PENDAPATAN HIBAH PUSAT

Rekap +/-Aset

-

99,900,000

Mutasi tambah aset tetap

Mutasi kurang aset tetap

Kapitalisasi barang jasa

BM tidak dikapitalisir

Aset ekstrakom

- Mengurangi beban

- dicatat sebagai beban lain-lain

99,900,000 dicatat sebagai beban lain-lain

INFO AKRUAL :

1 PENDAPATAN :

Retri-LRA 21	-	
Piut-20 Tertagih 21	-	
Ret-LO	-	
Piut- 21	-	
Ret-LO-21 Final	-	

2 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

- 2019	-	50 % x Rp. 1.800.000,00	-
- 2020	-	10 % x Rp. 4.200.000,00	-
- 2021	-	0,5 % x Rp. 236.514.000,00	-
- 2021 /Karcis	-		-

- Belum di verifikasi

4 PERASEDIAAN :

MISAL :1

	2022	2021
SISA DI NERACA AWAL	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	72,220,100.00	-
Persediaan dr Cetak.	-	-
SISA DI NERACA AKHIR	256,600.00	-
BEBAN PERSEDIAAN	71,963,500.00	-

PERASEDIAAN :	2022	2021	Belanja LRA	Beban LO
ATK	256,600.00	-	14,509,700.00	14,253,100.00
Alat Listrik	-	-	289,000.00	289,000.00
Alat Kebersihan	-	-	-	-
Obat-obatan	-	-	-	-
	256,600.00	-	-	-

5 BEBAN PENYUSUTAN

A. PERALATAN DAN MESIN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2021	(2,087,172,655.00)	12/31/2021
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(2,245,284,307.00)	12/31/2022
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	158,111,652.00	

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2021	(253,813,120.00)	12/31/2021
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(444,888,249.00)	12/31/2022
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	191,075,129.00	

C. JUJ

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2021	(19,917,224.60)	12/31/2021
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(39,834,449.20)	12/31/2022
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	19,917,224.60	

D. ASET TETAP LAINNYA

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2021	0	12/31/2021
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	0	12/31/2022
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	0	

E. ASET LAIN-LAIN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2021	0	12/31/2021
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	0	12/31/2022
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	0	

TOTAL BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP 369,104,005.60 2022

Beban Penyusutan Tahun Sebelumnya - 2021

6 Beban Utang Jk Pendek :

UJP 2022

	2021	2022	Belanja LRA	Beban LO
Air	-	0		
Listrik	-	0		
Telpon	-	-		
Speedy	-	-		
TV Kabel	-	-		
Utang Jasa Layanan	-	-		
	-	-		

Kode Rekening	Uraian	2022	MUTASI TAMBAH						MUTASI KURANG				TOTAL MUTASI KURANG	LO JADI TA 2022		
			Piutang tahun ini	Hibah dari pihak luar	Persediaan awal neraca	Utang tahun ini	BM tidak dikapital	Aset ekstrakom	Reklass masuk	TOTAL MUTASI TAMBAH	Piutang tahun lalu	Persediaan akhir neraca			Utang tahun lalu	Kapitalisasi barang jasa
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	29,560,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,560,750.00
8.1.02.03.02.0036.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20,440,750.00														20,440,750.00
8.1.02.03.02.0038.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7,700,000.00														7,700,000.00
8.1.02.03.02.0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin															-
8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	730,000.00														730,000.00
8.1.02.03.02.0411.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	690,000.00														690,000.00
8.1.02.03.03.0001.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor															-
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	121,790,289.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,790,289.00
8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	82,305,289.00														82,305,289.00
8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,485,000.00														39,485,000.00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat															-
8.1.02.05.01.0001.	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan															-
8.1.02.05.01.0002.	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi															-
8.1.02.05.01.0004.	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan															-
8.1.02.05.01.0005.	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)															-
8.1.02.05.02.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat															-
8.1.02.05.02.0001.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain															-
8.1.02.05.02.0002.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat															-
8.1.05.	Beban Hibah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1.05.02.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar															-
	Beban Penyusutan dan Amortisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,104,005.60
8.4.01.	Beban Penyusutan Peralatan Mesin															158,111,652.00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan															191,075,129.00
	Beban Penyusutan JJ															19,917,224.60
	Beban Amortisasi Aset tak berwujud															-
	Beban lain-lain		-	-	-	-	-	-	99,900,000.00	-	99,900,000.00	-	-	-	-	99,900,000.00
	BM Tidak dikapitalisir															-
	Aset Ekstrakom								99,900,000.00		99,900,000.00					99,900,000.00

Kontrol -
Total Beban -LO 3,255,996,945.00
Total Belanja Operasi 3,255,996,945.00

PENDAPATAN-LO -
BEBAN-LO 3,724,744,350.60
SURPLUS/DEFISIT-LO - 3,724,744,350.60
Pengujian - 3,724,744,350.60
Selisih -